



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Lubuk Alung, 19 September 1971, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. E-mail : xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Bunga Pasang, 11 Maret 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabuapten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/13/VIII/97**, tertanggal 14 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di xxxx xxxxx, kemudian pada tahun 2010 keduanya pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxx, terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK I**, tempat tanggal lahir Batam, 29 Januari 1999, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh Termohon;
  - b. **ANAK II**, tempat tanggal lahir Batam, 28 Februari 2001, umur 23 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh Termohon;
  - c. **ANAK III**, tempat tanggal lahir Batam, 04 Mei 2004, umur 20 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh Termohon;
  - d. **ANAK IV**, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 08 Juli 2011, umur 13 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini SLTP, saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa pada bulan November tahun 2020 Pemohon diberhentikan dari pekerjaan karena dampak virus covid-19, sehingga Pemohon membuka kedai kopi untuk mendapatkan penghasilan, namun kedai tersebut tidak berjalan baik dan Pemohon terpaksa menutup kedai tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya Pemohon merubah profesi sebagai driver ojek online dan penghasilan Pemohon tidak menentu, namun Pemohon berusaha memberikan uang nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menerima uang tersebut tanpa memberitahu alasannya, sudah sebanyak 3 kali Pemohon menolak uang nafkah dari Pemohon;
- c. Bahwa sikap Termohon berubah kepada Pemohon, seperti Termohon sudah tidak melayani dan menyiapkan keperluan sehari-hari Pemohon seperti keperluan makanan dan pakaian, sehingga Termohon terkadang memasak sendiri atau membeli makanan di luar, dan anak-anak Pemohon yang menyiapkan pakaian Pemohon;
- d. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Termohon tidak ingin menemani Pemohon untuk tidur bersama dan Termohon memutuskan untuk berpisah kamar dengan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2023, disebabkan karena permasalahan tersebut diatas dan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sejak saat itu atau kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba mengatasi masalah ini dan sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Irmansyah , yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada tanggal 05

Halaman 4 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Surat Keterangan Nomor: XXX/SK/11-1006/VIII/2024, atas nama Irmansyah, yang di keluarkan oleh Lurah Sungai Pelunggut, xxxx xxxxx, pada tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/VIII/97 Tanggal 14 Juli 1997, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON dikeluarkan oleh KUA Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1997 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak bulan November tahun 2020 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui karena masalah

Halaman 5 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dimana Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu merasa kekurangan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan April tahun 2023, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1997 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak bulan November tahun 2020 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu merasa kekurangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui cerita dari Pemohon dan juga dari cerita tetangga Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan April tahun 2023, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada suami (nusyuz/durhaka);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagai mana diuraikan pada posita permohonan Pemohon diatas, hingga terjadi pisah rumah tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerduta *juncto* Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam sama dengan domisili Termohon dan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karenanya harus dinyatakan Pemohon berkualitas Hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi SAKSI 2 dan SAKSI 3, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 9 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan penyebab bahwa Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu merasa kekurangan;, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada iktikat keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena bahwa Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu merasa kekurangan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohon pun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka semua didalam diktum permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan

Halaman 12 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat di dengar jawabannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

**Muzahar, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya:

|                   |      |            |                                 |
|-------------------|------|------------|---------------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |                                 |
| 2. ATK Perkara    | : Rp | 100.000,00 |                                 |
| 3. Panggilan      | : Rp | 38.000,00  |                                 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00  |                                 |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |                                 |
| 6. Meterai        | : Rp | 10.000,00  |                                 |
| Jumlah            | : Rp | 208.000,00 | (dua ratus delapan ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm